

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157, Kec. Sukun, Kota Malang, Kode Pos 65148.

KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Pelayanan Lelang;
- d. Seksi Piutang Negara ;
- e. Seksi Pelayanan Penilaian;
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara.

Seksi Pelayanan Penilaian

mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

Seksi Piutang Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh

keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Seksi Pelayanan Lelang

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

Seksi Hukum dan Informasi

mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Seksi Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Jabatan Fungsional Pelelang**
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.
2. **Jabatan Fungsional Penilai**
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN**
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang Milik Negara mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan PH dan atau Penjamin Hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL Malang.

Struktur organisasi **KPKNL Malang** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Bagan I

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



Sumber : PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016

Wilayah kerja KPKNL Malang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kota Batu;
4. Kota Kediri;
5. Kabupaten Kediri;
6. Kota Blitar;
7. Kabupaten Blitar;
8. Kabupaten Jombang;
9. Kabupaten Tulungagung;
10. Kabupaten Trenggalek;

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Malang didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang pegawai, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Jenis Kelamin		Jabatan				Golongan		
			L	P	III	IV	Fungsional	Staf	IV	III	II
1	Kepala Kantor	1	1		1				1		
2	Subbagian Umum	16	13	3		1	1	14		11	5
3	Seksi PKN	8	4	4		1		7	1	7	
4	Seksi Piutang Negara	5	3	2		1		4		5	
5	Seksi Hukum & Informasi	6	3	3		1		5		5	1
6	Seksi Kepatuhan Internal	5	2	3		1		4		3	2
7	Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang	4	3	1			4			4	
8	Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	3	2	1			3		1	2	
	Jumlah	48	31	17	1	5	8	34	3	37	8

*Data per 31 Desember 2023

2. Berdasarkan Pendidikan :

No.	Unit Kerja	Jmlh Peg.	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1/D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Kantor	1		1						
2	Subbagian Umum	16			6	6		4		
3	Seksi PKN	8		1	2	4		1		
4	Seksi Piutang Negara	5			2		2	1		
5	Seksi Hukum & Informasi	6		1	4	1				
6	Seksi Kepatuhan Internal	5			1	3	1			
7	Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang	4		3	1					
8	Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	3			3					
	Jumlah	48		6	19	14	3	6		

*Data per 31 Desember 2023

5. Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Pelelang : 4 orang
 - b. Penilai Pemerintah : 3 orang
 - c. Penatalaksana Barang : 0 orang
 - d. Pranata Keuangan APBN: 1 orang

C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Malang memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Malang senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Malang dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel.

Pengukuran Penggunaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan

Salah satu bentuk pengelolaan BMN yang baik adalah penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tools pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi penggunaan BMN adalah menggunakan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Pelaksanaan pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Sertifikasi BMN berupa Tanah

Dalam rangka mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) BMN berupa tanah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi terhadap BMN berupa tanah yang belum bersertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan program ini KPKNL bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja dengan dukungan Satuan Kerja untuk proses penerbitan sertipikat hak pakai.

Utilisasi Aset

Dalam pengelolaan BMN, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa aset yang dikelola telah terutilisasi sesuai peruntukannya. Peran Pengelola sangat vital dalam memberikan penetapan status penggunaan BMN sebagai dasar Kuasa Pengguna Barang menggunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Salah satu perubahan mendasar pada sektor pengelolaan aset Negara adalah pergeseran pola pikir dan sudut pandang. Jika sebelumnya BMN cenderung dipandang dan diperlakukan sebagai suatu beban (*cost center*), kini menjadi suatu investasi yang strategis dalam menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan sekaligus sebagai salah satu faktor sumber penerimaan pendapatan (*revenue center*).

Portofolio BMN yang sangat besar tentu harus dikelola dan diukur kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja aset ini diharapkan dapat merubah paradigma Pengelola BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Evaluasi kinerja aset dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengukur/mengetahui kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN, KPKNL sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset sehingga mengubah paradigma *cost center* menjadi *revenue center*.

Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 dan KPKNL melaksanakan pengurusan piutang negara dengan nilai penyerahan diatas Rp8.000.000,00.

Selanjutnya, KPKNL Malang juga melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2023.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Malang secara terus-menerus mengupayakan penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli (*acte van transport*) untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Malang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, pada tahun 2023, KPKNL Malang juga melaksanakan kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) Tahun 2023. KEDAI Lelang UMKM ini diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2. Mendorong ide-ide kreatif, inovatif serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli bagi masyarakat.
3. Memasyarakatkan lelang sukarela dengan mengenalkan lebih baik lagi kepada masyarakat penyelenggara lelang, baik KPKNL maupun Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
4. Mengeksplorasi produk UMKM di wilayah kerja kantor penyelenggara lelang dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Malang memperoleh PNBP berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Malang memperoleh bea lelang (bea permohonan lelang, bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual, bea lelang batal, serta bea lelang pegadaian) termasuk Uang Jaminan Lelang dari Pembeli Wanprestasi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Malang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) atau persetujuan pemindahtanganan/penjualan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja **KPKNL Malang** Tahun 2023 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Malang serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Malang tahun 2023.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Malang di tahun yang akan datang.

Sebagai pedoman dan motivasi bagi pegawai, KPKNL Malang membuat *Motto* yaitu **MBOIS** (**M**aju untuk memberikan layanan terbaik, **B**Onafive dengan layanan yang terpercaya, dan **I**Stimewa bagi seluruh pengguna layanan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden, KPKNL Malang berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, yaitu:

VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN to *distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;

- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

B. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2023 dijabarkan dalam melalui 9 Sasaran Strategis dan 20 IKU sebagai berikut :

1 SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

IKU : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120,00%

IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 100,56%

2 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%

3 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 102,88%

- 4 SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**
- IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien tercapai sebesar 120,00%
- 5 SS : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**
- IKU : Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara tercapai sebesar 112,60%
- 6 SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**
- IKU : Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction tercapai sebesar 106,00%
- IKU : Persentase pelaksanaan permohonan lelang online tercapai sebesar 115,95%
- 7 SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%
- 8 SS : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal**
- IKU : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 108,56%
- IKU : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tercapai sebesar 120%
- IKU : Deviasi Data PNBPFungsional DJKN tercapai sebesar 120%
- 9 SS : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**
- IKU : Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tercapai sebesar 120,00%

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPKNL MALANG
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
	Stakeholder Perspective (30%)							33.64%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112.14 %	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	138.18%	14%	29.79 %	138.18%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131.25%	14%	29.79 %	164.06%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67	89.17	19%	40.43 %	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective (20%)							24.00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	138.74%	14%	50%	138.74%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	137.03%	14%	50%	137.03%	120.00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28.84%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	82.03%	14%	30%	120.63%	120.00%	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	121.15%	19%	40%	121.15%	120.00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102.88%	14%	30%	102.88%	102.88%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00 %	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	40%	200.00 %	120.00%	hijau

4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	88.58	21%	60%	126.54 %	120.00%	hijau
5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							112.60%	
5a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96.84%	14%	100%	112.60%	112.60%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98 %	
6a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	164.38%	14%	33%	164.38 %	120.00%	hijau
6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	99.64%	14%	33%	106.00 %	106.00%	hijau
6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	99.72%	14%	33%	115.95 %	115.95%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29.68%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	108.56	14%	50%	108.56%	108.56%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	92.78	14%	100%	154.63%	120.00%	hijau
9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99.51	14%	100%	124.39%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								116.17%	hijau

Dalam kontrak kinerja tersebut di atas berisi Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU Tahun 2023 dan realisasi capaian IKU Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah turunan dari SS, yang merupakan indikator tercapai/ tidaknya SS tersebut. Pencapaian realisasi IKU dengan status hijau atau $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2023, KPKNL Malang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan dan sasaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, capaian kinerja, beserta analisisnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Ikhtisar capaian kinerja organisasi terdapat dalam IKU Kemenkeu- *Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPKNL MALANG
TAHUN 2023

	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
	Stakeholder Perspective (30%)							33.64%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112.14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	138.18%	14%	29.79 %	138.18%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131.25%	14%	29.79 %	164.06%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67	89.17	19%	40.43 %	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective (20%)							24.00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	138.74%	14%	50%	138.74%	120.00%	hijau

2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	137.03%	14%	50%	137.03%	120.00%	hijau
Internal Process Perspective (25%)								28.84%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	82.03%	14%	30%	120.63%	120.00%	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	121.15%	19%	40%	121.15%	120.00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102.88%	14%	30%	102.88%	102.88%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00 %	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	40%	200.00 %	120.00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	88.58	21%	60%	126.54 %	120.00%	hijau
5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							112.60%	
5a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96.84%	14%	100%	112.60%	112.60%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98 %	
6a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	164.38%	14%	33%	164.38 %	120.00%	hijau
6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	99.64%	14%	33%	106.00 %	106.00%	hijau
6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	99.72%	14%	33%	115.95 %	115.95%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)								29.68%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau

8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	108.56	14%	50%	108.56%	108.56%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	92.78	14%	100%	154.63%	120.00%	hijau
9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99.51	14%	100%	124.39%	120.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								116.17%	hijau

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Terdapat 20 (dua puluh) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Semua Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2023 telah memenuhi target dengan status HIJAU atau tingkat pencapaian target $\geq 100\%$.

Berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							112.14 %	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	138.18 %	14%	29.79 %	138.18 %	120.00%	hijau

1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131.25 %	14%	29.79 %	164.06 %	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67	89.17	19%	29.79 %	100.56 %	100.56%	hijau

Sasaran Strategis (SS) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan negara dan Lelang**

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							112,14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	138.18 %	14%	29.79 %	138.18 %	120.00 %	hijau

Nilai Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2023 adalah 120,00% dengan status capaian HIJAU.

Secara keseluruhan, capaian atas IKU Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2023 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120%.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

- b. Penggalan potensi PNBPN dari penjualan barang rampasan dengan mengumpulkan seluruh Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri se-Wilker KPKNL Malang sebagai Pengelola barang rampasan kejaksaan
- c. Penggalan potensi PNBPN dari pengelolaan aset Satker Badan Layanan Umum (BLU)
- d. Penggalan potensi PNBPN dari pengelolaan aset Satker-Satker besar di wilayah Kab. Malang
- e. Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan Penilaian agar segera menindaklanjuti permohonan penilaian dari Seksi PKN.
- f. Berkoordinasi dengan Satker agar segera menindaklanjuti persetujuan sewa dan penjualan BMN.

- g. Mendorong Satker agar segera mencari calon penyewa baru dan mengajukan permohonan sewa
- h. Memonitor secara intensif tindak lanjut persetujuan penjualan yang telah diajukan lelang.
- i. Untuk menutup target biad, KPKNL Malang menggali potensi dari BKPN yang masuk dalam kriteria crash program yaitu dari BKPN Penyerahan Universitas Negeri Malang
- j. Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- k. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online
- l. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang.
- m. Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan kejaksaan

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase produktivitas Lelang**

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							112,14%	
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131.25 %	14%	29.79 %	164.06 %	120.00 %	hijau

Realisasi presentase produktivitas lelang pada tahun 2023 adalah sebesar 131.25% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hasil tersebut diperoleh dari rincian frekuensi lelang laku sebanyak 924 dari total 1.862 lot lelang di tahun 2023. Adapun formulasi Persentase produktivitas lelang terdapat perbedaan antara tahun 2023 dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah lot lelang, sedangkan tahun 2021 dihitung berdasarkan jumlah frekuensi lelang.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholders agar lebih mendahulukan permohonan lelang yang berpotensi laku.
2. Koordinasi secara aktif dengan pemohon lelang terkait kelengkapan dokumen lelang.
3. Membantu mempromosikan produk lelang melalui media sosial.

KPKNL Malang berpartisipasi nyata mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid 19 dengan mengikuti Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM di wilayah kerja KPKNL Malang. Hasil dari pelaksanaan Kedai Lelang UMKM Tahun 2023 turut berkontribusi meningkatkan

produktitas lelang. KPKNL Malang diberikan penghargaan oleh Direktur Lelang DJKN sebagai Semifinalis Tim Kedai Lelang UMKM 2023.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Indeks Integritas

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							112,14%	
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67	89.17	19%	40.43%	100.56%	100.56%	hijau

Realisasi Indeks Integritas pada tahun 2023 adalah sebesar 89.17% dari target yang ditetapkan sebesar 88.67%, sehingga capaiannya sebesar 100.56% dengan status capaian **HIJAU**.

2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	138.74%	14%	50%	138.74%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	137.03%	14%	50%	137.03%	120.00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Persentase Realisasi Pokok Lelang

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	138.74%	14%	50%	138.74%	120.00%	hijau

Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 138.74% dari target yang ditetapkan 100% sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung kenaikan capaian ini tentunya tidak lepas dari penerapan strategi, diantaranya:

- a. Berkoordinasi untuk penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- b. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online.
- c. Melaksanakan koordinasi terkait lelang sukarela dan lelang barang rampasan.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120%	
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	137.03 %	14%	50%	137.03 %	120.00 %	hijau

Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2023 yakni sebesar 137.03% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 137.03%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan pengembalian sebanyak 532 BKPN penyerahan dari Universitas Negeri Malang sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- b. Melaksanakan updating data di aplikasi focus pn terhadap berkas eks perbankang yang sudah dikembalikan namun datanya belum di hapus di focuspn.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90 %	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	82.03%	14%	30%	120.63 %	120.00 %	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	121.15 %	19%	40%	121.15 %	120.00 %	hijau

3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102.88 %	14%	30%	102.88 %	102.88 %	hijau
-------	--	-----	------	----------	-----	-----	----------	----------	-------

Sasaran Strategis (SS) untuk Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90 %	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	82.03%	14%	30%	120.63 %	120.00 %	hijau

Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 mencapai 82.03% dari target tahun sebesar 68%. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120.63% dengan status capaian **HIJAU**.

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditujukan untuk memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas ideal yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Objek tingkat kesesuaian penggunaan BMN tahun 2023 adalah Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara/Mess/Asrama/Bungalow pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Keberhasilan kenaikan capaian target ini diperoleh berkat upaya maksimal dari tim dalam menerapkan strategi pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian SBSK tahun 2023, yaitu:

- a. Review bersama antara KPKNL Malang cq. Seksi PKN dengan Kanwil DJKN Jawa Timur dalam evaluasi dan verifikasi hasil perhitungan SBSK KPKNL agar diakui Kantor Pusat.
- b. Mengedukasi satuan kerja terkait optimalisasi penggunaan BMN target SBSK sehingga dapat meningkatkan skor SBSK.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya yaitu tahun 2023 antara lain:

- a. Mengedukasi kepada satker target terkait urgensi dan prosedur pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (PMK 172 Th 2020) dan PMK No.207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang berkorelasi positif dengan hasil/skor SBSK
- b. Koordinasi intensif dengan Kanwil DJKN Jawa Timur Selaku Pembina KPKNL Malang dalam rangka evaluasi hasil penghitungan SBSK
- c. Melaksanakan percepatan penyelesaian SBSK pada satker target

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90 %	
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	121.15 %	19%	40%	121.15 %	120.00 %	hijau

Jumlah Presentase bidang tanah BMN yang disetipikatkan pada tahun 2023 sebesar 2.009 bidang tanah sesuai dengan target tahun2023 sebesar 1.641 bidang tanah. Berdasarkan realisasi dimaksud diperolehh indeks tanpa batas capaian IKU sebesar121,15% dengan status capaian HIJAU.

Presentase pencapaian bidang tanah BMN yang disertipikatkan tersebut adalah sama dibandingkan dengan capaian 2022 yaitu sebsar 100%. Target yang sama nilainya dengan capaian mengindikasikan bahwa kegiatan verifikasi bidang tanah target berupa pengusulan daftar indikatif dan nominatif pensertipikatan yang merupakan salah satu langkah pra sertipikasi sangat rigid dan seksama.

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakn tindakan lanjutan dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai Jumlah BMN yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikat

2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan nama memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi , luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan oleh Kementerian/Lembaga
4. Melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada Kementerian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan setempat untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN dimana output yang dihasilkan adalah sertipikat

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114.90 %	
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102.88 %	14%	30%	102.88 %	102.88 %	hijau

Realisasi Persentase efektifitas penyelesaian BKPN pada tahun 2023 mencapai 102.88% (893 BKPN) dari target tahun sebesar 100% (868 BKPN). Sehingga capaian persentase efektifitas penyelesaian BKPN pada tahun 2023 adalah sebesar 102.88% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

1. Melaksanakan penagihan langsung.
2. Melaksanakan joint collection dengan KPPBC TMC Malang dan KPP Madya Malang dalam rangka penagihan (debitur a.n. Sujanto Harsono / PT. Usaha Loka) untuk segera menyelesaikan hutangnya.
3. Melaksanakan penagihan dan pemberitahuan Crash Program (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2023) kepada Debitur.

4. Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang negara

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00 %	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	40%	200.00 %	120.00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	88.58	21%	60%	126.54 %	120.00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Deviasi ketergunaan hasil penilaian

4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00 %	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0.00%	14%	40%	200.00 %	120.00%	hijau

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 0,00% dari target yang ditetapkan maksimal sebesar 25%, sehingga capaiannya adalah sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan status capaian **HIJAU**.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian tersebut dihitung dari 362 Laporan Penilaian dengan Obyek Penilaian khususnya berupa Barang Milik Negara. Secara keseluruhan capaian atas IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sama jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana capaian Tahun 2022 adalah sebesar 200%.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan Survei Lapangan Penilaian untuk semua objek yang berupa tanah dan bangunan.

2. Untuk objek selain tanah dan/atau bangunan, Seksi Pelayanan Penilaian berkoordinasi dengan Seksi PKN sehingga objek yang dimohonkan penilaian oleh Seksi PKN adalah barang yang nilai usulannya masih rendah atau belum mencerminkan nilai wajar.
3. Edukasi oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara kepada satuan kerja selain terkait pengelolaan kekayaan negara termasuk pula edukasi terkait penentuan nilai indikasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dengan melibatkan fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Malang;

Memfilter dan mengklasifikasi data pembanding untuk membentuk nilai wajar yang akuntabel.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 : Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00 %	
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70	88.58	21%	60%	126.54 %	120.00%	hijau

Jumlah Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien pada tahun 2023 emcapai indeks 88.58 dari target sebesar 70, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh indeks tanpa batas capaian IKU yaitu sebesar 126,54% dengan status capaian **HIJAU**.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							112.60%	
5a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96.84%	14%	100 %	112.60%	112.60%	hijau

Realisasi Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif pada tahun 2023 dengan capaian presentase adalah sebesar 112.60% dengan status capaian **HIJAU**, dengan rincian IKU sebagai berikut :

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 : Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara**

5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							112.60%	
5a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96.84%	14%	100%	112.60%	112.60%	hijau

Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 96.84% dari target sebesar 86%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 112.60% dengan status **capaian HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Mengedukasi satuan kerja terkait PMK Nomor 207/PMK.06/2021 yang menggantikan PMK 244/PMK.06/2014 dan PMK 52/PMK.06/2016 dan menyampaikan agar satker tetap menyampaikan tembusan laporan wasdal kepada KPKNL.
2. Berkoordinasi dengan satuan kerja baik secara formal dan informal untuk memantau persetujuan sewa dan penjualan yang belum ditindaklanjuti.

Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai pembina KPKNL Malang untuk memperoleh data dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan PNBP yang telah disetor oleh penyewa atau pembeli lelang BMN.

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98%	
6a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	164.38%	14%	33%	164.38%	120.00%	hijau
6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	99.64%	14%	33%	106.00%	106.00%	hijau

6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	99.72%	14%	33%	115.95 %	115.95%	hijau
-------	---	-----	-----	--------	-----	-----	----------	---------	-------

Sasaran Strategis (SS) untuk Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 : Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**

6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98 %	
6a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	164.38%	14%	33%	164.38 %	120.00%	hijau

Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 164.38% dari target sebesar 100%, (45 NUP) berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 164.38% dengan status capaian **HIJAU**.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum (Objek Kepentingan Umum, Rahasia Negara, Alutsista), manfaat sosial (Indikator yang sudah diterima secara Internasional), kepuasan pengguna (Reliability, Responsiveness, Assurance, Performance, Features, Aesthetics, Durability, Serviceability, Quality), potensi penggunaan masa mendatang (Penggunaan masa depan dengan kategori & signifikansi aset), kelayakan finansial (Manfaat ekonomi/ Pembedaan antara komersial & non komersial aset) dan kondisi teknis (Baik, rusak ringan & rusak berat sesuai PMK 181). Evaluasi kinerja BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja BMN, maka diperlukan data/informasi dari Pengguna Barang terkait aset yang akan dievaluasi dan survei data sewa aset sejenis di sekitar lokasi aset.

Kegiatan evaluasi kinerja BMN yang diformulasikan dalam IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.06/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2019 tentang Tahap Implementasi dan Mekanisme Perhitungan Nilai Indikator dan Prosedur Teknis Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Barang Milik Negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyelesaian profil NUP Aset, yakni:

1. Memanfaatkan data yang diperoleh dari survey lapangan dan menyesuaikan sesuai dengan aplikasi dengan cara survei secara daring dengan satker objek.
2. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Kanwil dan Kantor Pusat

Melaksanakan survey dan pelaporan Ekin sesuai dengan timeline dan dilaksanakan bertahap

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction**

6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98 %	
6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	94%	99.64%	14%	33%	106.00 %	106.00%	hijau

Persentase Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 99.64% dari target sebesar 94%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 106.00% dengan status capaian **HIJAU**.

Realisasi capaian ini dapat dicapai karena pelaksanaan lelang selama tahun 2023 seluruhnya sudah melalui aplikasi lelang.go.id kecuali lelang kayu PT. Perhutani sebanyak 18 frekuensi. Selain itu Para Jafung Pelelang Melakukan sosialisasi, koordinasi, bimtek, dan/atau penggalan potensi lelang kepada stakeholders/pemohon lelang untuk mengajukan lelang secara online melalui aplikasi lelang.go.id.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Persentase pelaksanaan permohonan lelang online**

6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113.98 %	
6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	99.72%	14%	33%	115.95 %	115.95%	hijau

Persentase pelaksanaan permohonan lelang online pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 99.72% dari target sebesar 86%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 115.95% dengan status capaian **HIJAU**.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 15 : Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00 %	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00 %	14%	100 %	120.00 %	120.00 %	hijau

Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**. Capaian IKU presentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2023 dengan capaian yang sama jika dibandingkan Tahun 2022 dengan capaian sebesar 120% dari Target 100%, hal ini disebabkan karena kesadaran masing-masing pegawai untuk terus mengembangkan kemampuannya sangatlah tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan secara rutin menginformasikan pengumuman diklat dan mendorong seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Malang untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	108.56	14%	50%	108.56%	108.56%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	108.56	14%	50%	108.56%	108.56%	hijau

Persentase Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 108.56% dari target sebesar 100%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 108.56% dengan status capaian **HIJAU**.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 pada Triwulan IV menggunakan perhitungan secara komposit dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 60%. Untuk Perhitungan IKU PKPA mengandalkan aplikasi OmSPAN - MonevPA untuk melihat 13 indikator hasil IKPA dan aplikasi SMART Kemenkeu untuk melihat Nilai Kinerja Anggaran. Berikut adalah Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Malang TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

NO	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.	PNBP Aset	32.406.188.112	20.091.217.979
2.	PNBP Piutang Negara	90.430.714	219.44.068
3.	PNBP Lelang	14.532.389.559	10.789.497.489

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau

Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2023 mencapai prosentase sebesar 120% dari target sebesar 100%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 : Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN**

8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116.19 %	
8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau

Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada tahun 2023 mencapai prosentase deviasi sebesar 0.00% dari target sebesar 15%, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 200% dengan status capaian **HIJAU**.

Deviasi penerimaan negara merupakan selisih yang terdiri dari :

1. Pencatatan biaya administrasi piutang negara di aplikasi Focus PN dan pencatatan penyetoran biaya administrasi di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN); dan
2. Pencatatan bea lelang PL I yang meliputi bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan bea lelang batal dan bea permohonan lelang, dan jasa lainnya (uang jaminan pembeli wanprestasi dan biaya penggantian kutipan Risalah Lelang) pada Dropbox lelang dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN);
3. pencatatan bea lelang Pegadaian pada Modul Pegadaian dengan pencatatan penyetoran bea lelang di kas negara melalui Online Monitoring SPAN (OmSPAN).

Kategori selisih adalah terdapat perbedaan jumlah biaya administrasi, sehingga adanya perbedaan waktu ke kas negara dengan pencatatan di aplikasi Focus PN selama dapat dijelaskan, tidak dikategorikan sebagai selisih.

Strategi yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN agar tidak ada selisih pencatatan biaya administrasi Piutang Negara dan Bea Lelang sebagai berikut:

1. Pencatatan real time di aplikasi FocusPN;
2. Rekonsiliasi mingguan antara Seksi Hukum dan Informasi dengan seksi Piutang Negara guna memastikan validitas pencatatan;
3. Rekonsiliasi Internal yang dilakukan bendahara penerimaan antara data rekening penampungan dengan data OmSPAN;
4. Update data transaksi yang terjadi pada aplikasi OM-SPAN diinput ke Dropbox;
5. Monitoring pelaksanaan lelang ke dalam aplikasi Dropbox;

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	92.78	14%	100%	154.63%	120.00%	hijau
9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99.51	14%	100%	124.39%	120.00%	hijau

Sasaran Strategis (SS) untuk Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif mendapat status capaian HIJAU. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 : Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	92.78	14%	100%	154.63%	120.00%	hijau

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif pada tahun 2023 mencapai indeks sebesar 92.78 dari target sebesar 60, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120.00%	
9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99.51	14%	100%	124.39%	120.00%	hijau

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada tahun 2023 mencapai indeks sebesar 99.51 dari target sebesar 80, berdasarkan realisasi dimaksud diperoleh prosentase capaian IKU yaitu sebesar 124.39% dengan status capaian **HIJAU**.

Capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian 91.18 dari target tahun 2022 sebesar 80, dengan persentase capaian kinerja sebesar 113,98%, hal ini tercapai dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilakukan dengan baik, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan atau eksekusi kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan intensitas edukasi kinerja yang dilaksanakan rutin untuk mengetahui permasalahan dan solusinya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN c.q. KPKNL Malang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan KPKNL Malang tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian **HIJAU**:

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Indeks Integritas
4. Presentase Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Rata-rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
11. Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

12. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)
13. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Convensional Auction
14. Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
17. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
18. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
19. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
20. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

A. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pencapaian tahun 2023 sudah di atas target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Malang, dengan nilai kinerja organisasi sebesar 116,58% dengan capaian HIJAU terdiri dari 9 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Meskipun keseluruhan IKU yang berjumlah 20 sudah memperoleh capaian hijau masih terdapat beberapa permasalahan yang mungkin mempengaruhi capaian IKU tahun berikutnya, antara lain permasalahan terkait IKU Persentase realisasi pokok lelang yaitu permasalahan banyaknya permohonan lelang Eksekusi yang tidak laku (TAP) yang disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan terlalu tinggi, adanya permasalahan hukum, objek lelang tidak marketable.

B. Strategi Pemecahan Untuk Tahun 2023

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di tahun 2023 tersebut, maka di tahun 2024 diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari permasalahan dan kendala pada KPKNL Malang tersebut, rencananya akan dilakukan upaya yaitu dengan cara mendorong pemohon lelang agar mendahulukan permohonan lelang yang mempunyai potensi laku sehingga dapat mengurangi potensi lelang yang tidak laku (TAP).

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dimaksudkan sebagai arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2023 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dengan visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai

kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.